



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KONSTANTIN SIBORO**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**
3. NHK : **54088**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 190.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 606.014.151**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 3.301.014.151**

III. HUTANG **Rp. ---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.301.014.151**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.